

Daftar Pustaka

Jurnal – Jurnal :

- Atmojo, M. E., Fridayani, H. D., Kasiwi, A. N., & Pratama, M. A. (2017). Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo. *ARISTO*, 5(1), 126-140.
- Devi, N. P. C. S., Erviantono, T., & Supriyanti, N. W. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Menurut Uu No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Riang Gede Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan). *Citizen Charter*, 1(1).
- Kembuan, K. T., Lumolos, J., & Sumampow, I. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Lantaka, M., Kaunang, M., & Lengkong, J. P. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Mangoto, K. (2016). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Politico*, 3(1).
- Puryanti, M., Nurcahyanto, H., & Hariani, D. (2014). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(2), 160-169.
- Sayuti, A. H. Y. (2014). Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Sumolang, K. (2017). Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 6(1).
- Walukow, C. (2016). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa). *Jurnal Eksekutif*, 1(7).

Williyanto, R. (2015). Reformasi Birokrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Implikasi Budaya Politik Keraton. *Jurnal Review Politik*, 5(02), 196.

Skripsi dan Disertasi :

Arsono, U. (2014). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Kabupaten Sleman Untuk Pengembangan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial).

Kurniawan, H. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.

Nugroho, Vendy. (2011). Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Sudimoro Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun 2007-2008. (Skripsi IP UMY.)

Saputra, F. D. (2017). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Doctoral Dissertation, Fh Umy).

Taqwa, M. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Zakaria, E. (2017). Kinerja Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Dengan Stiker Tahun 2015.

Buku – Buku :

Ardana, I Gusti Gede. 2007. Pemberdayaan Kearifan Lokal Masyarakat Bali dalam Menghadap Budaya Global. Denpasar: Pustaka Tarukan Agung.

AS. Moenir. 2001. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Bumi Aksara. Jakarta

Gibson, dkk. 2013. Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses, Edisi Kedelapan Jilid 2, Alih Bahasa. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2016.

Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE

Hararap, D. (2001). *Sistem Pengawasan Mnaajemen*. Jakarta: Quantum.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Peraturan Pemerintah dan Perundangan :

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawraatn Desa (BPD).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa, dalam laporan pertanggung jawaban atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Website :

- Pemerintah Desa Bangunjiwo. (2017, Juli 29). Pemerintahan Desa : Badan Pemusyawaratan Desa. Dipetik September 30, 2017, dari Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Web site: <http://bangunjiwo.bantulkab.go.id>
- Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017, Agustus 20). Bagian : Kebudayaan Pemerintahan (SATRIYA). Dipetik Oktober 11, 2017, dari

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Web site :
<http://biroorganisasi.jogjaprov.go.id>

Dokumen-Dokumen Lainnya :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes) Bangunjiwo Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bangunjiwo Akhir Tahun Anggaran 2015 dan Akhir Tahun Anggaran 2016

Kumpulan Notulensi Hasil Rapat dan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Bangunjiwo Tahun 2015 hingga Tahun 2016

Dokumen Realisasi Pembangunan Desa Pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016